

Judul : Mafia Minyak Goreng, antara Ada dan Tiada
Tanggal : Jumat, 25 Maret 2022
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 3

Mafia Minyak Goreng, antara Ada dan Tiada

Indikasi peranan mafia minyak goreng dalam kelangkaan pasokan minyak goreng di Tanah Air sempat dilontarkan dalam rapat di DPR. Namun, hari demi hari berlalu, mafia yang dimaksud tidak juga kunjung diungkap.

Kelangkaan minyak goreng yang disertai tingginya harga menimbulkan kerentanan Republik ini di bidang pangan. Sosok mafia di tuduh sebagai pihak yang mengambil kesempatan di tengah situasi sebagaimana dikatakan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi.

Menteri Perdagangan di depan Komisi VI DPR, Kamis (17/3/2022), menyatakan temuan dugaan adanya mafia minyak goreng. Dalam kesempatan itu, Lutfi mengatakan telah menyerahkan data ke kepolisian, termasuk sudah ada calon tersangka dan akan segera diumumkan pada Senin (21/3). Waktu berjalan, sosok mafia itu tidak kunjung diumumkan.

Beberapa hari kemudian, Kepala Satuan Tugas Penan Polri Aspektur Jenderal Helmy Sanjaka mengatakan polisi belum menemukan adanya praktik mafia dalam pendistribusian minyak goreng di Tanah Air.

Sejauh ini belum ditemukan mafia minyak goreng. Mafia lebih dikawatirkan sebagai persekongkolan besar, mafia, dan terstruktur yang melibatkan banyak pihak. Sampai saat ini tidak ditemukan praktik seperti itu," kata Helmy (*Kompas.com*, 23/3).

Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel mengatakan, yang terjadi bukan mafia, melainkan pengusaha yang mencari celah untuk mencari keuntungan. Gobel mengaku tidak memahami yang dimaksud sebagai mafia tersebut.

Lantas sebenarnya siapa mafia itu? Kita bisa saja menyebut itu oknum, tetapi kelompok itu mafia yang membuat minyak goreng ini menjadi tetap langka dan harga tetap terkendali di luar harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng," kata Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan da-

lam Satu Meja the Forum bertajuk "Ada Mafia di Balik Minyak Goreng?" yang disiarkan Kompas TV, Rabu (23/3) malam.

Dalam diskusi yang dipandu Wakil Pemimpin Umum Harian *Kompas* Budiman Tanurejo, hadir anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dedy Sitorus dan Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Taulhid Ahmad.

Menurut Oke, dari data yang disampaikan produsen, distributor, sampai ke pengecer ke Kemendag, lengkap dengan faktur pajak, seharusnya kelangkaan minyak goreng tidak terjadi. Setidaknya tercatat sekitar 4000 distributor minyak goreng yang menjadi saluran distribusi ke masyarakat.

Semua data tersebut, termasuk dugaan adanya mafia minyak goreng, telah diserahkan ke kepolisian. Namun, meski dari sisi pemerintah menulisi telah terjadi penyimpangan, tetapi dari sisi hukum masih perlu pembuktian lebih lanjut.

Namun, Dedy tidak sepakat dengan penyebutan mafia. Sebab, menurut dia, mafia merujuk pada sebuah kejahatan yang terorganisasi, terstruktur dari hulu sampai hilir. Terkebih, ketika kebijakan HET minyak go-

reng dihapus, minyak goreng kembali muncul di pasaran.

"Mafia dalam bahasa saya itu kejahatan yang terorganisasi. Itu, kan, tidak. Mereka melakukan sendiri sendiri, mencari kesempatan sendiri sendiri," ujar Dedy.

Isitilah kartel

Oleh karena itu, Dedy lebih sepihak dengan penggunaan istilah kartel, alih-alih mafia. Mereka bisa jadi terdiri atas beberapa pengusaha yang secara langsung atau tidak mengikat hubungan dari pasaran. Pihak-pihak tersebut telah melakukan tindakan yang membuat harga minyak goreng terus naik sehingga memaksa pemerintah mengubah kebijakan. Sementara kebijakan pemerintah terkait minyak goreng dinilai tidak berkelanjutan karena tidak disertai pengawasan dan penegakan hukum yang kuat.

Namun, menurut Oke, keputusan HET minyak goreng bukanlah bentuk kebijakan negara. Oke juga tidak sepihak dengan penyebutan kartel. Menurut dia, upaya pihak-pihak itu telah menghalangi program pemerintah untuk menyediakan minyak goreng dengan harga terjangkau. "Daya jangkau kami itu terbatas. Karena di peraturan perundang-undangan kita ini, begitu kita masuk ke tata kelola, sanksinya itu administratif, tetapi perlakuan tidak diberi sanksi," ujar Oke.

Dengan kebijakan yang dikeluarkan Kemendag, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Keuangan, pemerintah memastikan ketersediaan dan keterjangkauan minyak goreng di pasar. Kebijakan itu menyangkut harga minyak goreng, tentang penyediaan minyak goreng curah, dan kenaikan pungutan ekspor CPO.

Menurut Taulhid, langkanya minyak goreng merupakan buntut dari kebijakan tata kelola dan distribusi minyak go-

reng. Ketika harga minyak sawit mentah (CPO) mulai naik, harga minyak goreng juga mengikuti. Namun, ketika pemerintah mengintervensi dengan mengeluarkan kebijakan penetapan harga domestik (DPO), maka sebagian kalangan industri bersikap "menahan", yakni tidak melakukan ekspor, tidak membeli tandan buah segar, dan tidak mengalokasikan CPO untuk kelola negeri.

Dengan kebijakan penghapusan HET, maka masalah kelangkaan minyak goreng akan teratasi. Namun, kebijakan itu dapat menimbulkan masalah berupa peralihan konsumsi dari

minyak goreng kemasan ke minyak goreng curah yang disubsidi pemerintah.

Solusi

Menurut Dedy, kebijakan mengenai tata niaga mesti diperbaiki, termasuk perlunya disiapkan cadangan minyak goreng. Pemerintah juga diminta untuk memiliki sistem peringatan dini dalam rangka menjaga stabilitas harga. Hal itu penting karena saat ini produk CPO tidak hanya menjadi minyak goreng, tetapi juga menjadi kebutuhan industri dan kebutuhan untuk bio-fuel.

Oleh karena itu, DPR beren-

cana membentuk panitia kerja (panja) terkait komoditas pangan secara umum, tidak hanya minyak goreng. Pembentukan panja juga terkait dengan sikap DPR yang memberi kesempatan kepada pemerintah untuk melaksanakan kebijakannya.

Sementara itu, Taulhid menekankan pentingnya stok minyak goreng. Stok itu dapat dikelola Perum Bulog dalam jumlah yang memadai dengan jalur distribusi yang baik. Dengan demikian, ketika terjadi kenaikan harga, pemerintah bisa melakukan operasi pasar.

Di sisi lain, pemerintah juga

dituntut perlu melakukan pengawasan agar tidak terjadi penyimpangan di lapangan. Terlebih, sebentar lagi akan memasuki bulan puasa dan Lebaran. "Mau tidak mau selain mengaktifkan regulasi, harus mengendalikannya stakeholder untuk memastikan harga eceran ini benar-benar terjadi di masyarakat," kata Taulhid.

Kelangkaan minyak goreng kali ini bukanlah yang pertama kali. Semestinya pemerintah mengevaluasi dan menantisipasi bukan hanya menumpukan kepada mafia.

(NOBILATI S. NIA
PUANANGA MARITANI)

